

## WALI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 3 TAHUN 2023

#### TENTANG

# BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

## WALI KOTA TANJUNGPINANG.

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa untuk pelaksanan APBD, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal I angka I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

### Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pangadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 27);
- 22. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 25);
- Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

KESATU: Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut :

## 1. Bendahara Penerimaan

memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),dan bendahara penerimaan berwenang:

- a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
- b. menyimpan seluruh penerimaan;
- menyetor penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja; dan
- d. mendapat bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

### Bendahara Pengeluaran

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung- jawabkan pengeluaran uang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas berwenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) dalam rekening bank yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) yang dikelolanya melalui mekanisme non tunai;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
  - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
  - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
  - menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- j. memeriksa kas secara periodik;
- k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

#### KETIGA

- : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA juga menjalankan tugas dan wewenang yang bersifat khusus, yaitu sebagai:
  - a. Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki tugas dan wewenang meliputi :
    - a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOS;
    - b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS;
    - mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada buku kas umum dan kas pembantu;
    - d. membayar belanja dari Dana BOS;
    - e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOS;
    - f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana BOS setiap bulan;
    - g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan;

- menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan
   Dana BOS setiap semester dan/atau sisa Dana BOS;
- menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran;
- j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS;
- k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS;
- menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS;
   dan
- m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bendahara Pengeluaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki tugas dan wewenang meliputi :
  - a. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi pendapatan/penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan;
  - b. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi penggunaan belanja Dana Kapitasi JKN;
  - c. melakukan pembayaran atas belanja Dana kapitasiJKN pada FKTP sesuai peraturan;
  - d. membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP secara periodik (bulanan) dan menyampaikan kepada Kepala FKTP;dan
  - e. melakukan pemungutan dan menyetorkan ke Kas Negara/Daerah atas kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang melakukan aktivitas terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- KELIMA : Larangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT sebagai berikut:

- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Khusus.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang.

KETUJUH

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal WALI KOTA TANJUNGPINANG.

RAHMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Daerah;
   Inspektur Daerah; dan
- Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang

Auforday Value Antionem and Comment of Comments of Com

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELJARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGELU

THE PERSON	ORGANINASI PERAMBAKA DARKAH.	EDPDARAZO, PEREZERAAN	HENDARARA PENGELUARAE (APRIL)	BENDABARA PENGELORRAN LIKE/NOS	SERDABANA PERENDAAN PERENDE	BENDAMARA PENGELUADAN PENERHIT
-						4
-	DINAS PENDIDISAN		SELPIANORA HAPPEDA, A. MU NP. 19780526 200601 2 030			
D)	DINAS KESIDISATAN, PENDEMBALIAN PENDUDUK LIAN	HINA SICTIA	WINDU, A.Md. Kep			
	ASSAURCH BENEMUSINA	NIP. 19831225 200504 2 012	MP. 19640102 200604 1 004			
	BADAN LAYAMAN UMUM DAERAH / HUMAH BARIT UMUM		DESERVACE		RECE SURYAN, AMIC	ERMAWATI, SE
15	DARBINH		MP. 1979 1215 200504 2 027		NEP. 1977 1 123 201001 7 006	MIN. 1986:211 201001 2 008
			iRendahara Pengelaanan BUUD)			
		COSTINA SUSTANTIE	KHARKUL AZHAR			
		NIP. 19850803 200803 2 001	NZP. 19800105 200504 1 015			
·	DHAE PEKEKLAAN UMUM DAN PEKATAAN BUANG	(Bendahars Penerissan UPTD SPAN)	BURYADI, S.IP			
-			NIP. 19770121 200902 1 001			
			(Bendahara Pengeluann UPTD SPAM)			
			WIDYAWATI, SAF			THA LESTARI, ST
			90P. 19780612 200312 2 006			NP. 19851031 201001 2 000
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,					WASIS
	KERRESHAM DAN PERTAMANAN					MIP, 19740421 200701 1 019
						NUMBIC DITYAH UTAMI
_						MIP. 19820910 200604 2 035
	The state of the s		SIGHT ASSIDANL A.Md			
10.00	CURAS ACMUNICASI DAN CIPOCINATION		NP. 19791128 200701 2 009			
	And the second of the second o	SEWALINGS	JAMALUDDIN			
	THEORY THE CHARLES THE CONTRACT OF THE CONTRAC	MP. 19960722 201503 1 002	NP. 19720336-200604-1-003			
	AND THE REST VALUE OF SALE OF SALE OF SALES		DWI ARINE SULESTYANI, A AND			
	DRIVE KAPTEROUTUNAN UNIN PERKAINISK SIPLE		NIP. 19781223 200604 2 018			
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERUNDUNGAN		KUSNANDAR			
,	ANAK DAN PEMBERDAYAAN MARYANAKAT		MP. 19781016-200604 1 009			
	Contract and Application of Contraction of the Contraction of Contraction Cont		RENNY LAURA			
2	SHAD TOWNER ILEGA, ACCTOOM DAY OSCIOL MINES		KIP, 19800418-200604-2-025			
	ACADUSTIC MANY MANAGEMENT OF AUTOMOBILE		MUHAMMAD BAMBURG			
	THE VIS. IN SECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO		MIP. 19800727 200604 1 027			
-	THE COURSE OF STATE O		TEGUII SUGRATNO			
	DAY WAS TONE THE COLUMN		NIP, 19700627 200312 1 003			
	at age contains an area and a second		INA HARLINA			
	SATUAN POLISI PANCING PROLIA		NIP 19830619 200791 2 007			

URET,	KERA	BENDAMARA PERENDAMAN	HENDARARA PENGELUARAT (APED)	BENDAHARA PENDEZIARAN LIDI (BOS)	BENDAMASA PERENGAN PERUATU	BERESAMANA PENCELUANAN PERENUTU
						1
2	DINAS PEMADAN EDBALASAN DAN PENYEAMATAR		TRE HAPBATE KUBUMABTUTI, 5.5es KRP, 196:10122 201001 2:005			
6	BADAN PENCELAKAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BILN'N ANGGRAIM, A.Net 1979-101 (20070) 2-013	TUND FITTERA, SEE MRP. 198207708.204701.2.006			
92	SELECTARAT DPED		ABAMO REDHA YAZID, SE MR. 1989080-120002			
25	SIGISHISTARIAT DAGGAN		ABD SYAKUSE NOV. 19810315 200701 1 013			
70	DACIAH UMUM					II, DIAN HOVITASAIB, A.Mill
$\neg$						NP. 19810824 201503 2 001
90	BACIAN PROTOKOL DAN KOMUNEKASI PIMPRIAN					HAMBANG RAHARJO, S.See NP. 19831004 291001 1 002
20	BACHAN PEMBIANGUNAN					TISHA, SE and coast-sent assentity in your
						TOMBET DARFLAN, A.Md
22	BACIAN PEARENHTANAN					NIP. 19030507 200902 1 007
23	BACIAN ORGANIBASE					GATOT TREWARKUSE
$\neg$						NIP. 1985S806 201503   002
24.0	BAGINN KESELAHTERAAN KANTAT					ISTEMATORITY A.A. A. MAIL NIP. 1982 1223 200504 2 0 13
+						STATES OF TRANSPORT
25	BACIKN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM					NIP 19840408 200502 1 003
						AMALIA SARI, SH
20	BACINO HUNDA					MIP. 19830329 201303 2 001
27. 89	BACHAN PIPHCADAAN BARANG DAN JARBA					AMIN KUSMIRANTINI, SB NEP 19840K IS DONIGH 2-013
+						The second second second second
5.5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PILIAYANAN PERPADU SATU PINTU	OLCY SYANUTRA NIP. 19830628 200902 2 003	NR. 19830917 200902 2 003			
8	secamatan tanjung-hinng kota		YESSI ASTRIA, S.IP MIII. 1980IS513 201001 2 006			
30	KECAMATAN TANJUNGPONANG BARAY		JULIAWATI NIP. 19780737 200604 2 624			
331 808	RECAMATAN TANJING PINGUR		ZANCHI PIRCHAUS			
$\neg$			HIP. 19890430 201503 1 002			
32 68	SECAMATAN BUKIT BESTIARI		HICKY ACUISTISANTO, A.Md MP. 19800868-201001 1-013			
13	DACES OF SERVICE AND AND AND THE SERVICE AND SERVICE OF		WALTY POLIS WINASSEE			
	ALTER TEMPORALISM MAN CONTAINS AND ACCOUNT.		NIP. 19791005 200604 2 034			
35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEAISIPAN		ROSALIA JULIUS, S.IP			
+			COUNTY CAN'T CHARLOW COM			
35 DC	DONAE ROSIAL		MUNCH SHALL SEMESTALIN, SASO			

1000	KERTS	SELDINGLE, PERSHALL	HENDANANA PERGESTAPAS (APRD	BENDANARA PENGELCARAF LIEL/ROS.	BENDARAN PERENDIAN PERENTU	BEITHARATA PERINEUMANA PERINAFT
-		4	- 4			1
8	DINAS JUBICUNYANE DAN PARIMINAN		MAYDA BARWITA, A.MG MIP. 19818330 200312 2-006			
H	DONAS PERTANDAN PANCARIO DAN PEREKARAN	MUSELINA, SE. NB: 19760731 201001 2-004	THE YUDOL, BUTS. MITS. 1006. MITS. 1967-1010-201001-1-006.			
22	DINAS PERHUBUMAN	BAMBINAR NIP. 19930530 30300+ 2-017:	SULISTIYONO, 18E NT: 19730069-200802-3-1605		WOWER WULLANDARY, B.AP.	VIDE ADJUNA PUTRI, A ME
素	DIRALI PERDACIANCIAN DAN PERINDURTRAN	RIAWANI MIP. 1972/1004 200604 2 007	DW1 MURANANISYAR MP 19821015 200604 2 020			
9	INSPECTORAL DAESAN		HASANIUM, A.MII NIP. 19700105 200701 1 946			
=	BADAN PERENCANAN PENENGUNAN, PENELITIAN DAN PENCEMBANDAN		MOVIANA, B.AF MP. 1981 1107 20000 2 015			
2	BADAN PENDELDIAAN KELIANDAN DAN ASIT DABBAH:		ARDIANEYAN MEY 1975 LLOP SOONEZ 1 (33)			
7	BADAN KEPEDAWAAN DAN PEMDEMBANCAN SUMBED. Daya mamuria		TRI UMANI, A MI MP. 19790064 201001 2 013			
2	KELUBAHAN SENDGARANG KECAMATAN TANJUNGHKANG NOTA					DWITTHRAMASARI
10	RECURSION TANGENCINANG KETA KECAMATAN TANEUNGPINANG KETA					L.E.N.1
2	KELÜRARAN PENYENGAT KECAMATAN TANUNGPHANG					DWI INDAH PERINAMA, A.Md
-	MUTA MUTA					NIP. 19900306 201503 2 005
	KELUSPAHAY SANDUNG BIGGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG KIDTA					KREETIN NAMATALIMA BUTAR BUTAR, A. ME NIP. 19891223 301150 2 062
	KRIZUBRAJAN BIJIOT CERRIEN KRICAMATAN TANJURGPINANG BIARAY					MUHAMMAD KABKAN, EAP
1	KELJURAHAN KEMINSIA KECAMATAN TANJUHSPHANG					DIYANGGERAH ERTI, And
	BAIM					NIP. 19871213 2015022 001
	KELUKAHAN KAMPUNCIBAHU KECAMATAN TANJUNCHAMACIBAKAT					PAJBAIN NIP. 19720403 200703 1 033
	KELUBAHAN TANJUNGHNANG HARAT KECAMATAN TANJUNGHNANG BAHAT					AMERICAS WINGARPRINANTO
	KEGLURAHAN AIR BAJA KECAMATAN TANJUNGHNAHG.					AIMAD
	TMUR					ND: 196/40516-200701-1-029
	KELURAHAN KAMPUNG HULANG ERCAMATAN TAKJUNGPINANG TINUK					ILVA ROBA NP. 19850422 201503 2 002
	RELUBIATION PROME REPORTS RECOMMEN					AYU WAHYUNI, A Mid MIP TORROTIA DISSASS SISSA
	NELLIBAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN TANJUNDINANG TIMUR					AND IELA PRASTIWI NIP. INSTITUTO JODGO D 020
	KELÜBAHAN BATU BI KECAMATAN TAKUNGPBANG					HIN ANGIORANS

THE .	NEWS NEWS PROPERTY NAMED IN COLUMN NAMED IN CO	BELLIAMANA PRIERIESA	BENDARAL PENDELTARLY (APED	RESERVED PERCENTAGE AND PARTY BOTH	MENDANCE PRINCIPLE PERSONS	BERDRICKS TENDESONALIS PERIOD TO
H	18.			4	9	***
100	KELINAHAN TANJUNGNISANO TIBNIN SZOSANTAR BUKIT					WULAR BARE HARDAYARE
- 1	HESTAR					JRIP. 198304 IV 201001 2 006
91	KELURAHAN YANJUNG UNGGAY JUSCAMAYAN BUILTI					MARTIN
	desind					MP. 19700825 200902 2:001
gi-	KELLIBAHAN DOMPAK KECAMATAN BURUT BESTAR					EUFSEZAL.
						Comments on the comments of th
9	SCHLIFFIAN WE JAME LECAMATAN BUILT HESTAR!					PRINE SUSSAINTS
1	STATES AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE					RIA RAMLI YETHIA MG
ē	BESTARI					MIP. 19910116 201503 2 003
170	to the state of the state of the state of			REZA HANDAYANI, A MA Sob	DIAN PRATING A.Md. Keb	REZX HANDAVANI, A.M.C. Sets
2	PUBLISHAND SHI WANG			MW. 1986 125 201101 2 003	36P. 19950609 301902 2:007	MIP. 19881125 201101 9 003
1 3	Characteristics at 19 to 18 to			REAL DISTANTS, A.Md. Kep.	DEBAK MADIL AUBSKANTA, E. A.M.E. Seh	ELM DEPLANT, A.Md. Rep.
3	TO SHAROWING TO PROTECTION			MBP, 19840411.301101.2.005	MEY: 19WHG33T 201990FG 003	MIN. 19840411: 201101-3:005
	the contract of the contract of			MARINDA, AMX	PATHA DEWLAHE.	MARLINDA, AME
5	A CONTRACTOR AND A CONT			NET, 19500517 200604.2-014	NR. 19790102 201001 2 003	MP. 19630517 200004 2-014
99	Security and the second			BILA MULYANI	MILAN SUSTANTE, AMK	IKA MULYANS
- 34	ALCOHOLD THE CONTRACTOR OF THE			MP. 19631114 200902 2 006	Mit. 1990052 201503 2 002	MP. 19831114 200902 2 006
99	PATRICIA NATION CONTRACTOR PROPERTY.			EVA SUSTANTS, A.M.G. Neb	DINDA ATU THAHARANI, SIGM	EVA SUBANTI, A.Md. Keb
				MIP. 19880927 201704 2 005	MEF 1996/020E 202202 2:001	MIP. 19880927 201704 2 605
2.9	SECULIAR AT MIDERALD HARDS			MYSA 1871 WASTYLING, AMB	ENA DURA CICTARIANI, AMN	JAYSA SCD WASHUNI, AMK
	The second secon			MIP. 19870627-201001-2-004	NOT. 1987 1011 200902 2,005.	NQF: 19870627 201001 2 004
3	PERSON FINANCIAL TRANSPORTED TOWN CONT.			DWI ESBCA PERSONANTI, AMIC	NURL ENGANA, AMIC	DWI ERIKA PERHIYANTI, AMK
				MIP. 19680213 201503 2 001	MIP. 19920609-201563-2-093	MP. 19880213 201503 2 001
69	SERVICAN DARKED					CITRA BLANE
0.54						MIP. 19830602-200601-2-011
30	TK MICCINE PERESON 1					PIRMANSYAH
						NF.19700226 200701 1 012
ž	TO NECOUR PERMINANT					DABMITA
						MIP.19700930 198903 2 002
2	The MEDICAL STREET, ST					NOVERAMAYANTI, S.PILAUD
						MP.1977   109 200502 2 006
	St. MISCERS TREATMENT A					KORDIAH, S.Fd. AUD
	- Constitution of Constitution					MP.19620B17 2007B1 2 836
	1 GEOGRA 10					SULASTRU, S.PH
	The second of th					MP-J9731631-201001-2-001
7	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					APRIAMA, S.PE
	The Charleson III					NIP.1979G462 200502 2 005
34	TIL NEGRED 7					SSNAING, B. HE. ALID
						MP.19641330 199203 Z 000
1.4	TIL MIGIERY &					EMA STYANDROATI, S.P.CAUD
1						MIP. PUTBLED STANFALL & NOO

VMCT	REBUS.	Sell profitable Parterance	SHILDSENEY THROUGHAND MASS	STATEMENTA PERGESTARIA STE 209	SECTIONARY PERENCHAN PERCENT	RESTABLES PERSECUARAS PERSENT
				-	*	41
TA BAT NECES	-			ISSI AMDAYANE		BRE AMBAYAND
_				NO. 19730505 200902 2 001		NIF. 19730525 20992 2 001
TS SAF VECTOR	175			BAMBANG POND PUTRO		BAMBAHO PONO PATRO
_				MP. 19720616 200902 1 001		MIP. 19720610 200902 1.001
76 SUAP NECESSES	F 80			BKI SURATMI		SR SURATMI
				NIP.19830916 200604 2.010		NP. 19830016 202504 2 010
A NATIONAL PARTY A	4 10			AVU ADSILYANTI		AYU APRIYAND
and the same	¥ 00			MP.19630806-201001-2-002		MF-19630806-261001-2-002
nare with the	8 2			TULLANETO		YULLANTO
SMT SHARE				NIP, 197 10723 200604 1 009		NIP.19710723 200004 1 609
20 SECTION SECTION S	44			PSIGA ADI DASA, E.NE		YUDA ADI DAYA, S.Pif
-				MH, 19890636 201902 1 004		MP.19890630 201902 1 001
SAME NEWSTREEN	9 9			SUSTINDI		SUSTAIN
1000				MIP. (9800A02 20060) 1 012		NIP. J980pp-trg. 200801. 1 013
TOWN SECURITY IS	100			UNEA PETSTANE		LINEA PITHIANE
				NEP. 19640701 201001 2 00P		MP-19640701 201001 2 007
SMP NEGESTS 9	0.0			M. AMIN		M. AMERI
DISCOURT OF THE PARTY OF THE PA				NaP. 19700629 200902 1 001		NIP.19700529 200902 1 001
DI DECEMBER 100	-0			DELIV HARVANA		DESTY HARDANA
Paralle and				NIP.19821227 201001 2 004		MP.19821227 201001 2 004
SAP MEDICINES				SUDDOMO		SUDMONO
				NIP. 14670603 200902 1 001		MIP. 19670603 390903 1 00.1
EL BESCEN YMI	50.5			MAHMUDOUN		MAHMUDDEN
				NIP. 19700101 199303 1 026		MP. 19700101 190303 1 028
CH SECUCION APPEA				R. RUDI CARRA, A.Maling		R. PRUDI CAMBA, A.Melling
The second				NOP, 1977/0803 200801 1 017		NEP. 1977/08/03 2008/01 1 017
AL RECUES 14	77			TENDED BILLA NANDA DINANYI, S. PE		TICHCICO SHELLA NAMEA CHINAPET, S.P.E.
				NIP. 19951027-201902-2-006		MP, 19961027 201902 2 006
State WELDERE 13	125			DEW! MARYAMTI		DEWT MAINTAWTT
				NIP.19620304 200751 2 009		MIP.19820304 200701 2 006
SAMP NECESSES IN	96			SUHAINA, A. Met		SUBAINA, A. Md
				MIP, 19283 103 200504 2 016		MP. 19781103 200804 2 010
BANCHARE FO	BARDISAR YZGIATAN BEGALIAR					MUSHAZUMIA
and Assessment Asses	The same of the sa			PREDATUL JANKAR, S.PE		
1	THE MANAGEMENT STATES AND STATES			MP.19930801.301902.2.008		
SCHOOL SECTION CON	SCHOOL STATE STATE STATE			MANTIA MARINI, S.P.		
1	CONTRACT DESCRIPTION			MIP.19s705055 202012 2 00H		
AD MEDERN O	AD NECESTRAND FURET DRAFFARI			SEHARYANI, S.Pd		
The second second	Secretary second second			MIP.196#1223 199103 2 007		
D DESCRIPTION OF	NO MICHING OOM HEACTT RESCHARE			WIWIK SUKAKITAH, E PLB		
				NIP 10700820 1995.tb 2 001		

DE LO	Oppositions respective totalists	HENDARANA PENDRUMAN	BESTARASA PENGELTARAS (APRE)	BEFRAINS PENGELLABAN UTD/80%	RESIDING PRESENCE PERSON	HENDARDER PENGELUARAF PERSHATT
	44		,	Trip		+
40	CONTRACTOR OF SECURITARIA			HEMILIAN BAPTING R.P.C.		
_	The second court of the se			MIP.19921112 202012 2 513		
96	SECURED ON HOUT BESTARE			HERE WIRDWOTG, E.Ps.		
-				MP.15480522 202012 1 003		
- 6	SENSE			EZZY SEPTRISONO, B.HGJ		
	ACCOMPANY WHITE KINDS I SERVICE CANADA			NBP.19910908 201402 2 00Y		
- 10	MANAGEMENT AND STREET THE SECOND STREET			SUSBAWATI, S.P.E		
	TO MERCHANIST WHILE BUSINESS CONTROL C			NEP. 19830214 200701 2 013		
000	the second section of the second seco			DWIDDLA PUTDI WARDANI, B.Ps.		
_	at/ Michael des Sout destrate			MP.19950903 201902 2 605		
-	AND ADDRESS OF A SALE			SUVANTO, SUM.		
3	Consists of Consists and Consists			NEP. 1957 1207 203601 1 005		
101	THE PROPERTY AND A STATE OF THE PROPERTY OF			LUIS RAING, S.P.U.		
	D REGERG UNI BUILT SESSION			NIP. 10860506 300905 2 003		
	The property of the text and the property of the text and the property of the			SUSTLAWATE, S.Ph.		
107	SKI MIGRARI DIZ BUKIT BEZINE			MIP, 19870928 201503 2:001		
100	are sectional to the section and are sectional and			BAYU YOOO PRATOMO, E.PH		
_	the managed with spanned security and			MIP.1992041£ 201902.1.003		
70	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PR			SETT HAJAR, E.PG.ED		
_	C Military 014 DOM: DESTROYE			MIP, 19830628 201503-2-001		
100	SOLVEN WAS DO NOT BE SOLVEN OF SOLVE			SUITAYA ROSA MAISAWATT, S.P.C. SD		
_	A Machine Way Stone Library			MEP. 1979/03/12 200604-2 030		
YOU.	THE ADDITION OF THE PARTY AND THE PARTY TO SERVE THE PARTY THE			KHAIRUL APHADI, S.P.S.		
	CONTRACTOR AND THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			NIP.19930424 201902 1 005		
107 80	SIGN WINCESTED OF TANK CONDITIONAND DATES.			TATE SURVANTI, A.Min		
_				MIP.19770510 200312 2 006		
104 90	SET MELCO DE 1904 TABLELLA DE NAMES DA DATE			KASBU, IIAR		
_				ME 197 10326 199310 1 001		
100	SES MEGRAPH ONE TAXALITMORRISANG RABAT			DANTI PRAMESWANE, SUNI		
$\overline{}$				NIP. 1989 1235 201902 2 004		
110	TABLE CAN HUMBER WAS BOOKED TO THE CONTROL OF THE C			DESTI SURYAM, S.Fe.I		
_	CHICAGOS AND TOTAL STATES ACCOUNTS			HIP. 19721203 200302 3 004		
111	OF MEDICAL OF TAXABLE MARKET DARKET			PAUZAN AZIMA, S.P.E.SU		
	Commence of the Commence of th			MP.19691134 199404 1 001		
110	THE PROPERTY OF STREET STREET,			Hj. T.ERNE ASSMTA, S.PR		
_	Company of the Control of the Contro			KRP.19670996-300801-2-096		
111	PACIFIC DISCHARGE THE PARTY OF THE PACIFIC AND			SEEL KUREMATY, SUM		
	Company with Control of the Control			HETT 10/06/0729 20 10/20 2 00%		

TART	EXEMA	The state of the s	the said and said the	Section College Colleg	STREAM SERVINGAN PRAIRIETO	The second secon
U	da					
114 ME	TABLED DISTRIBUTION OF THE PROPERTY OF THE PRO			STARDFAS AMMISA, ILPG		
	The second secon	The state of the s		Attended to Strain 2 date		
10	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			LISAMINA, 2. PL.I		
_	Company of the contract of the			WIP.19870417 201902 2 004		The state of the s
116 185	AND RECORD ON TRACIONOPHARM SCOTA			AFTANA SEPTIA MURTIDA, A.ME		
	A TEMPERATURE AND ARREST AND ARREST			MP.34710030 200701 2 010:		
411	ATO SCHOOL TANK TOWNSTONED SCHOOL STORY			MASTURA, S.Fu.		
-	With the state of			MIP. 199 IO729 2020 t2 2 004		
100	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			MUHAMMAD PADLE, 8,PE, Jak		
	C Minister Office SAMACOPACITION ACCESS			MP.19900416-202221 1-016		
911	Annual continues about the said of each term as a last continue of			MUR APRIYAMI, S.PL.SD		
	O MECHANIC COST TANACO MACENTANTA ACOTA			NIP.19860417 20190E 2 001		
100	Transport that a first country to the past country that are not to the country of			SRD RAHMA DAHGA, 5.74		
_	O NECESSARY ONES CARROLL INCIDENTAL PACIFIC			MER. 1993 10321 301 002 2 005		
101	AND METERSON OF STATE			IKA IRAWATI, S.P.S.		
	CHARLES OF THE PARTY OF THE PAR			MP.19840330 201902 2 004		
199 600	ATTENDED TO THE PARTY OF THE PA			DWI ASTUTY, SLM		
	A PROCESSO SALE TRANSPORTED TRANSPORT BALLON			MP.19850912 201902 2 002		
125 805	SECURISIONS TAXALISMOMNAMIC ROTTA			RAHMI SAPITRI, N.P.S.		
_	The second secon			MP-19870114 201902 2 002		
194 801	ATCS CINA MICENSTRANCE OF COLORS AND STATES			ADLYAMINO, ILM		
	Company of the Compan			MP.19840632.301982.1.005		
198 689	ATOM OF TAXABLE MAN CONTRACTOR OF THE PARTY			MURAD, S.Pit		
				MIP. 19670MGS 200861 1 014		
100	SCHOOL TANK TO STANK AND THE S			MAYA PUTRO NESUMA, E.PE		
_				NP. 19900 102 201902 2 006		
a-9-9	the building of the second sec			HARMATTANTI, S.P.I		
	Allegate cod medicated twenty through			MP.19830503 200701 2 007		
178	CONTROL OF THE TANK IN TANK THE PARTY OF THE			ANDI PUTRA, S. MLSD		
	MODELLA CONTROLLA CONTROLL			MP. 19850208 201902 1 002		
130 001	SELECT DRANKING THAT YOU SEED IN			MUSTALIM, S.P.E.		
	The second secon			MIP. 19720301 300701 1 019		
001	THE MINISTER CORP. THE STREET STREET, WITHOUT STREET,			YORDKA SACITA PUTRI, S.Pt.		
	AND STREET STREET STREET STREET STREET			MP.19921201 201902 2 004		
131	STANDARD DOG TANK STORY SANDERS AND TO SECURE OF			ZAZMNUR, S.M.		
	Ministral vices (Spirit Spirit			NP.19900601 201503 2 002		
_	CONTRACTOR TAN II INCIDENCE OF THE INCID			DBM ADRIANL, S. P6		
-	Control one state or a state or a state of the state of t			NRP. 19840121 200604 3 013		
123	the same of the same			DESTA SIMANJUNTAN, S.PE		
_	MEGLESS AND TANAMASSIMAND THROUGH			MR-19911214 201902 2 005		
				MUSRZENTUN, S.PK.:		
134 050	SED MACHINE DATE TANDONICHMAN TIMON					

S to	OBGANDSAR PERABOSAT DAZRARI	SEEDLIANA PENTABLIAL	BENDAEALA PERCECUARAT (APER)	BUILDAFAEA: SERCEUTABAY LIMS/BOS	BENDARANA PENENDHAAN PENENANTO	BENEVALIARA PENGESTARAN PENERASTE
				-		
2	138 SIC NICOSÁR STITANIONOPHIANO TRIGUE			MUNICIPATION, E.P.O. MIT. 19910721 202512 2 002		
ř	THE SED NEGOTIO 032-TABLOWORD THRUIT			VERA DAMAYAPTI, S.P.II MIP. 1985DS05-201400-3-003		
123	127 SEL MEGERO DLG TANGLUMORPHAND TIMUR			PARTNER GREINA, S. DII HIP. PREMING 200804 2 015		
10	13h SID NEGISIEI 014 TANJUNGIPHANG TIMUR			MASYKURFADEL, S.P.E.I. NIP. 19900428, 201001, 1 007		
138	139 BD NEGERO 015 TANJURGPINANG TINGR			RAJA VERAWATI, E.P.E. NIP. 1984 I IGS 200503 2 006		
140	140 GD NEDERHOLD TANGUNANG TIMUR			SYARIFAH MAZNAH, B.P.ESD NIP. 19760627 200212 2 008		
3	143 SO MEGDER 017 TANJUNDPYNAND TYMUR			PANE SOMIA OSTAWIARTY, S.P.E.		

WALINGTA TANCHOPINAND.